

LAPORAN KINERJA

Tahun 2023

DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2023

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja Triwulan IV TA. 2023 Satker Direktorat Kelabuhanan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap dapat diselesaikan. Sebagai salah satu unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kelabuhanan Perikanan sejak Tahun 2013 telah memanfaatkan *Balanced Score Card* sebagai suatu alat dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan, sehingga seluruh unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. *Balanced Score Card* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Mengacu pada RPJMN 2021 – 2024 dan RKP tahun 2023, Direktorat Kelabuhanan Perikanan senantiasa mengoptimalkan pelaksanaan seluruh rencana aksi dengan efektif dan efisien, sesuai target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKP dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Direktorat Kelabuhanan Perikanan kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode satu tahun. Pencapaian pada Tahun 2023 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*baseline*) untuk menetapkan target pada tahunberikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2023.

Semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas Direktorat Kelabuhanan Perikanan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 Januari 2024

Direktur Kelabuhanan Perikanan

Tri Aris Wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.94.689.143.000 -. Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2023 ini adalah sebesar Rp. 80.243.894.496,- atau mencapai 84,74% (sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id/>). Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Tahun 2023 masuk dalam kategori baik, yang ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar 109,29% dan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK sebesar 109,29%.

Terkait dengan Indikator Kinerja, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja di tahun 2023, dimana pada triwulan IV dilakukan perhitungan 17 (tujuh belas) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal			
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya (Persen)	6	6	100
	2. Persentase Pembangunan SKPT (Persen)	80	100	125
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing			
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	31	31	100
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	1	2	200
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	26	26	100
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	40	44,75	118,88
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	15	15	100
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	40	36,06	92,65

	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	77	77	100
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	76	76	100
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	77	77	100
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal			
	12. Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	296	296	100
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	81	81	100
	14. Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	87	89	102,3
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100	100	100
	16. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100	100	100
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan			
	17. Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan KP (Orang)	741	964	130,09
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan			
	18. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	93	99,21	106,68
	19. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	79	88,12	111,54
	20. Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	92	133,33	144,92

21. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	75	100	133,33
22. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	95	84,74	89,20

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2023)

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU dan Tim Pengelola Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja triwulanan yang akan datang. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan diharapkan dapat mendukung kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
1.5 PERMASALAHAN UTAMA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN	4
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	5
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	6
2.2 PERJANJIAN KINERJA	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA	9
3.2.1 <i>Sasaran Kegiatan (SK-1): Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Optimal</i>	10
3.2.2 <i>Sasaran Kegiatan (SK-2): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing</i>	15
3.2.3 <i>Sasaran Kegiatan (SK-3): Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal</i>	36
3.2.4 <i>Sasaran Kegiatan (SK-4): Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepeelabuhanan Perikanan</i>	57
3.2.5 <i>Sasaran Kegiatan (SK-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat Kepeelabuhanan Perikanan</i>	58
BAB 4 PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2023	7
2	Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan triwulan III tahun 2023	9
3	Capaian IKU "Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya" sampai dengan triwulan IV tahun 2023	10
4	Perbandingan Capaian IKU "Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya" sampai dengan triwulan III tahun 2023	15
5	Bentuk Kegiatan pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya pada triwulan III tahun 2023	11
6	Capaian IKU "Tingkat operasional pelabuhan perikanan" sampai dengan triwulan III tahun 2023	15
7	Perbandingan Capaian IKU "Tingkat operasional pelabuhan perikanan" sampai dengan triwulan III tahun 2023	15
8	Perhitungan Persentase Operasional Pelabuhan Perikanan triwulan III tahun 2023	15
9	Capaian IKU "Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar" sampai dengan triwulan II tahun 2023	21
10	Perbandingan Capaian IKU "Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar" sampai dengan triwulan III tahun 2023	21
11	Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan" sampai dengan triwulan III tahun 2023	22
12	Perbandingan Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan" sampai dengan triwulan II tahun 2023	22
13	Alokasi dan Realisasi Anggaran triwulan III tahun 2023	23

DAFTAR GAMBAR

1	Stuktur Organisasi Direktorat Kelabuhanan Perikanan Tahun 2023	3
2	Perjanjian Kinerja Direktur Kelabuhanan Perikanan Tahun 2023	9
3	Dashboard Aplikasi Kinerjaku Dit. Kelabuhanan Perikanan Tahun 2023	12
4	IP ASN Tahun 2023 Direktorat Kelabuhanan Perikanan Triwulan III Tahun 2023	63

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan *outcome* berupa pengelolaan perikanan yang efisiensi dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah yang diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah pengembangan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Ketersediaan pelabuhan perikanan di sentra usaha perikanan tangkap sangat penting dalam mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan dan usaha pendukungnya. Pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur penilaian kinerja suatu Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung terciptanya tujuan dimaksud, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja. Dasar dari penyusunan laporan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 68/Permen-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama Triwulan IV Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan dalam suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan ke depan.

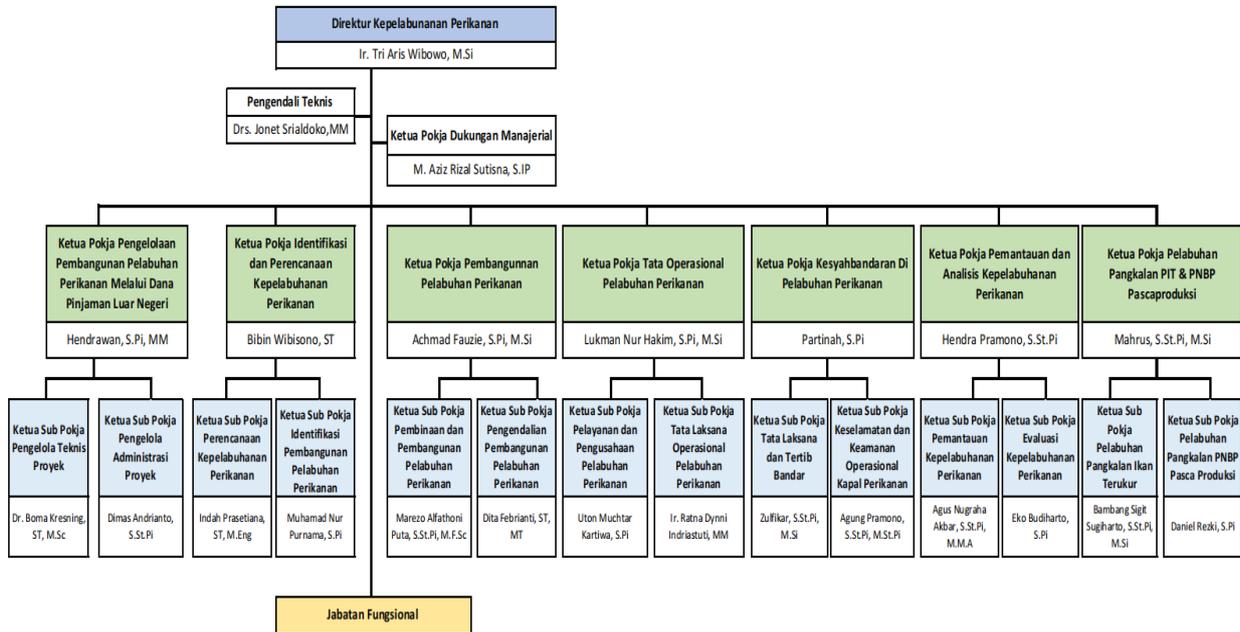
1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB V Bagian Keenam Pasal 67, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Sedangkan sesuai pasal 68, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
5. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2023 (sesuai dengan Surat Tugas Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.396/DJPT/KP.440/VI/2023, Tanggal 20 Juni 2023)

1.4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

- Sasaran kegiatan pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah **“Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal”** dengan indikator kinerja:
 - Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.
 - Persentase Pembangunan SKPT
- Sasaran kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing”**, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen);
 - Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen);
 - Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen);
 - Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen);

- e. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen);
 - f. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen);
 - g. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen);
 - h. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen);
 - i. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen).
3. Sasaran kegiatan ketiga (SK-3) yang akan dicapai adalah "**Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal**", dengan indikator kinerja:
 - a. Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan);
 - b. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan);
 - c. Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala);
 - d. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen);
 - e. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen);
 4. Sasaran kegiatan keempat (SK-4) yang akan dicapai adalah "**Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan**", dengan indikator kinerja: Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP.
 5. Sasaran kegiatan keempat (SK-5) yang akan dicapai adalah "**Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan**", dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)
 - b. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)
 - c. Persentase unit Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar;
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dan;
 - e. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN

Pelabuhan perikanan dalam pengelolaannya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, tetapi aspek lingkungan juga penting di perhatikan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Perpaduan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial merupakan suatu model pendekatan pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan yang riil demi keberlanjutan pembangunannya dengan mengkombinasikan penerapan manajemen pelabuhan yang pro lingkungan.

Pengelolaan pelabuhan, dihadapkan pada tantangan dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang sistematis. Kurangnya pengaturan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, dewasa ini terasa sangat mengganggu dalam pengembangan potensi maritim yang dimiliki Indonesia.

Persoalan lain yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk mengelola Pelabuhan Perikanan, tanpa memperhatikan kemampuan dan ketersediaan fasilitas. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh keinginan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya.

Beberapa permasalahan pokok Pengelolaan Pelabuhan Perikanan telah teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya operasionalisasi Rencana induk pelabuhan perikanan nasional (RIPPN) pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan);
- b. kurangnya Syahbandar dan Petugas Syahbandar yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan;
- c. kurangnya jumlah pelabuhan perikanan yang tergabung Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), terutama Pelabuhan Perikanan yang ada syahbandarnya;
- d. terdapat operator PIPP yang dialih tugaskan ke Unit Kerja yang lain;
- e. rendahnya kepatuhan dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu dalam aplikasi PIPP;
- f. Belum optimalnya sinergi pengelolaan Pelabuhan Perikanan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2023 disusun sebagai berikut:

A. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

B. Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

C. Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

D. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas -

tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

E. Bab 4 Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap disusun berdasarkan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional terkait dengan sektor kelautan dan perikanan dengan rencana strategis sebagai berikut:

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Visi DJPT tahun 2020-2024 adalah “terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadiann Berlandaskan Gotong-Royong”;
2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
 - b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
 - c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
 - d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Sasaran Strategis Pembangunan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		WAKTU PENGUKURAN	TARGET
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	Triwulan	6
		2	Persentase Pembangunan SKPT	Tahunan	80
2 5	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3	Persentase lokasi Pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan(persen)	Tahunan	31
		4	Rencana Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (dokumen)	Tahunan	1
		5	Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat operasional optimum (persen)	Tahunan	26
		6	Tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan (persen)	Tahunan	40

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	WAKTU PENGUKURAN	TARGET	
		7	Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja baik (persen)	Tahunan	15
		8	Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (persen)	Tahunan	40
		9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (persen)	Tahunan	77
		10	Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	Triwulan	76
		11	Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (persen)	Tahunan	77
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	12	Pelabuhan perikanan yang menerapkan penangkapan ikan terukur (pelabuhan)	Tahunan	296
		13	Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi (Pelabuhan)	Tahunan	81
		14	Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (nilai/skala)	Tahunan	87
		15	Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan fish market bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)	Tahunan	100
		16	Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan Pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep Eco Fishing Port yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)	Tahunan	100
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan	17	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	Tahunan	741
	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18	Nilai rekonsiliasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)	Tahunan	93
		19	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan perikanan (indeks)	Semester	79
		20	Persentase unit kerja Direktorat Kepelabuhanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Triwulan	92
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	75
		22	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	95

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2023)

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kelautan dan Perikanan menetapkan Perjanjian Kinerja sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebanyak 5 (lima) sasaran kegiatan dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL djpr@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tri Aris Wibowo**

Jabatan : Direktur Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Agus Suherman**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 November 2023

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Kelautan dan Perikanan

Agus Suherman

Tri Aris Wibowo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya (Persen)	6
		2	Persentase Pembangunan SKPT (Persen)	80
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	31
		4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	1
		5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	26
		6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	40
		7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	15
		8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	40
		9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	77
		10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	76
		11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	77
		3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	12
13	Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)			81
14	Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)			87
15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)			100
16	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)			100

DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan	17	Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan KP (Orang)	741
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	93
		19	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	79
		20	Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	92
		21	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	75
		22	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	95

Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
 Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 94.689.143.000,-

Jakarta, 24 November 2023

Pihak Kedua
 Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
 Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Agus Suherman



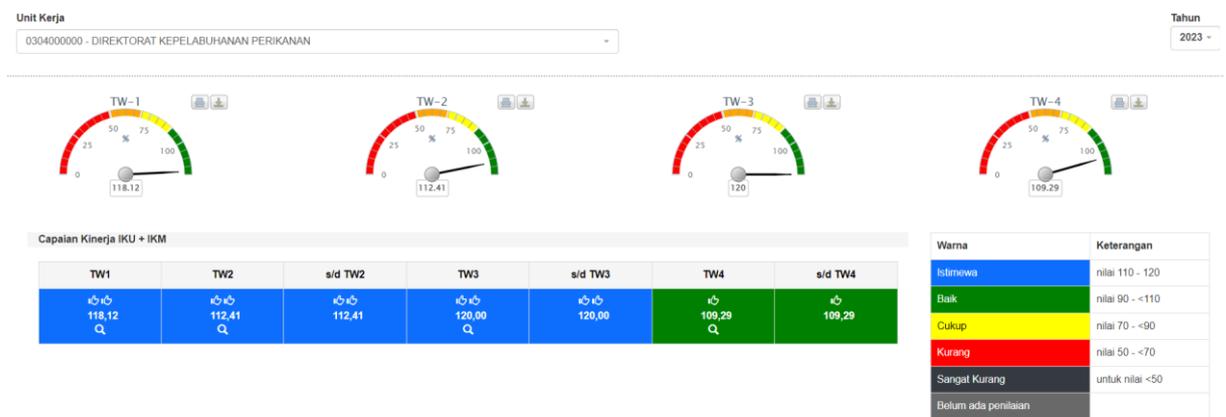
Tri Anis Wibowo

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktur Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2023
 (Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2023)

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2023 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kepelabuhanan Perikanan menitik beratkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 4 (empat) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II dalam bentuk dashboard sebagai berikut:



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023)

Capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan IV tahun 2023 masih dalam kategori baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK sebesar 109,29%. capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian Kinerja IKU Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2023 ini masih belum maksimal, salah satunya dikarenakan penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 hanya 84,74%. Berikut adalah capaian 22 IKU sampai dengan akhir Triwulan IV 2023.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal			
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya (Persen)	6	6	100
	2. Persentase Pembangunan SKPT (Persen)	80	100	125
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing			
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	31	31	100
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	1	2	200
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	26	26	100
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	40	44,75	118,88
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	15	15	100
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	40	36,06	92,65
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	77	77	100
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	76	76	100
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	77	77	100
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal			
	12. Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	296	296	100
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	81	81	100

	14. Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	87	89	102,3
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100	100	100
	16. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100	100	100
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan			
	17. Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan KP (Orang)	741	964	130,09
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan			
	18. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	93	99,21	106,68
	19. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	79	88,12	111,54
	20. Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	92	133,33	144,92
	21. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	75	100	133,33
	22. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	95	84,74	89,20

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja adalah proses evaluasi yang mengukur sejauh mana suatu organisasi atau individu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam analisis ini, data kinerja dicermati untuk menilai pencapaian target, identifikasi masalah, dan perbaikan yang diperlukan. Dengan melibatkan pengukuran kuantitatif dan kualitatif, analisis capaian kinerja membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan strategis, dan pengembangan program perbaikan. Hal ini menjadi alat penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas suatu entitas, baik dalam sektor bisnis, pemerintahan, maupun sektor sosial, serta membantu memastikan perbaikan

berkelanjutan dalam pencapaian tujuan. Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Optimal

A. Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.

Sasaran Kegiatan Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan merupakan tujuan dari program Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, sasaran ini memiliki Indikator Kinerja, yaitu **Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya**.

Indikator ini menunjukkan persentase pembinaan pengembangan pelabuhan perikanan guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. Adapun metode perhitungan yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan jumlah lokasi capaian pengembangan di Pelabuhan Perikanan berupa salah satu kegiatan:

1. Analisis dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan pelabuhan perikanan
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan
4. Pembinaan pembangunan di pelabuhan perikanan
5. Pengendalian pembangunan di pelabuhan perikanan
6. Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan
7. Supervisi Kegiatan Pembangunan

Indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 6%. Penghitungan didasarkan pada jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (**Rpp**) dibandingkan dengan jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah dan melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (**Rrippn**) 642 PP bersifat kumulatif.

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Rpp}}{\text{Rrippn}} \times 100\%$$

Tabel 3. Capaian Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya

SS 1		Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal								
IKU 1		Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)								
		Realisasi 2018-2022				Realisasi 2023			Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	8	3	6	6	100	36	100	

Pada Triwulan IV 2023, pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya sudah mencapai target sebesar 6%. Hal ini terukur dikarenakan semua lokasi pelabuhan perikanan yang melaksanakan pengembangan fasilitas Pembangunan fisiknya mencapai 100% terselesaikan dan bisa dimanfaatkan.

Tabel 4. Pelabuhan yang diidentifikasi perencanaan pengembangan/ pembangunan

No	Lokasi	Jenis Kegiatan
1	PPS Belawan	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
2	PPS Bitung	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
3	PPS Kendari	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
4	PPS Cilacap	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
5	PPS Nizam Zachman	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
6	PPS Bungus	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
7	PPS Lampulo	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
8	PPN Karangantu	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
9	PPN Brondong	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
10	PPN Merauke	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
11	PPN Kejawanan	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
12	PPN Pengambengan	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
13	PPN Pekalongan	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
14	PPN Sibolga	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
15	PPN Kwandang	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
16	PPN Palabuanratu	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
17	PPN Prigi	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
18	PPN Ternate	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
19	PPN Pemangkat	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
20	PPN Tual	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan

No	Lokasi	Jenis Kegiatan
21	PPN Tanjung Pandan	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
22	PPN Sungailiat	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
23	PPN Ambon	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
24	PPN Idi	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
25	BBPI Semarang	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
26	PPN Muara Angke	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
27	PPP Teluk Batang	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
28	PPP Tegalsari	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
29	PPP Bajomulyo	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
30	PPP Tasik Agung	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
31	PPP Mayangan	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
32	PPP Sadeng	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
33	PPI Cituis	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
34	PPI Ciparage	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
35	PPI Granjangan	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
36	PPI Tanjung Limau	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
37	PU Benoa	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
38	PP Perintis Untia	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
39	PP Perintis Teluk Awang	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
40	PP Perintis Dagho	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
41	PP Perintis Biak	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan
42	PP Perintis Selat Lampa	Identifikasi Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Pelabuhan Perikanan

B. Persentase Pembangunan SKPT (Persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase progress pembangunan pelabuhan perikanan di SKPT guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Jumlah capaian progress pembangunan pelabuhan perikanan SKPT meliputi:

1. Penyiapan dokumen lelang Pembangunan SKPT.
2. Penandatanganan kontrak.
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan konstruksi.
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi.
5. Serah terima pekerjaan.

Cara menghitung persentase progress Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah jumlah capaian progres Pembangunan di 4 lokasi SKPT dibagi dengan 4 lokasi SKPT.

Tabel 5. Capaian Persentase Pembangunan SKPT

SS 2		Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan perikanan yang optimal								
IKU 2		Persentase Pembangunan SKPT								
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	80	100	125	-	-	

Mencapai 100% dikarenakan lokasi pelabuhan yang direncanakan semula 4 lokasi SKPT bisa dilaksanakan 5 lokasi

3.2.2 Sasaran Kegiatan (SK-2): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing

A. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan rencana pembangunan dan/atau pengembangannya. Identifikasi pelabuhan perikanan meliputi:

1. Analisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan perikanan.
2. Pembahasan dan koordinasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Cara penghitungannya adalah Jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau (**Rppa**) pengembangannya dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (**Rrippn**)

Tabel 6. Capain Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan.

SS 2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing										
IKU 3 Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan										
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-			31	32	103	-	-	

Lokasi pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/ atau pengembangan pelabuhan perikanan pada tahun 2023 adalah sebanyak 215 yang terdiri dari:

Tabel 7. Rekapitulasi pelabuhan perikanan yang di analisis terkait Pembangunan/pengembangan

No	Pelabuhan	Jumlah
1	UPT Daerah	93
2	UPT Pusat	22
3	PUD	26
4	Swasta	18
5	DAK Fisik	56
TOTAL		215

B. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)

Indikator ini menunjukkan tersedianya dokumen rencana dan konsep pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berwawasan Lingkungan. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan dan/atau Pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan meliputi: Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan diantaranya studi kelayakan, dokumen lingkungan, KKRL, WKOPP, Masterplan, DED.

Penghitungan berdasarkan pada jumlah dokumen perencanaan dan konsep Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan Lingkungan.

Tabel 9. Capain Rencana Pembangunan dan pengembangan Berwawasan Lingkungan.

SS 2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing										
IKU 4 Rencana Pembangunan dan pengembangan Berwawasan Lingkungan										
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-			1	2	200	-	-	

Pada tahun 2023, terdapat 2 Pelabuhan yang telah dilengkapi dokumen perencanaan dan konsep Pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu PPN Ambon dan PPN Tual.

C. Persentase Pelabuhan Perikanan dengan Tingkat Operasional Optimum

Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum:

Jumlah capaian akan dilihat dari:

- Fasilitas minimal Pelabuhan perikanan
- Kriteria teknis
- Kriteria operasional
- Kelembagaan
- SDM
- Anggaran Operasional

Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah pelabuhan perikanan dengan Tingkat operasional optimum dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN

Tabel 10. Capaian Persentase pelabuhan perikanan dengan Tingkat operasional optimum

SS 2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing									
IKU 5 Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	26	26	100	-	-

Terdapat 117 pelabuhan perikanan dengan Tingkat operasional optimum, dengan rincian sebagai berikut. Jika dibagi jumlah pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN (454), maka capaian persentasenya adalah 26% (target tercapai).

Tabel 11. Pelabuhan perikanan dengan Tingkat operasional optimum

No.	Provinsi	Kabupaten	Nama Pelabuhan
1	Kepulauan Riau	Kota Batam	PP Swasta Bareleng
2	Kepulauan Riau	Kota Batam	PP Swasta Telaga Punggur
3	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	PPI Manggar
4	Bali	Kab. Badung	PPI Kedonganan
5	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	PPI Tanjung Luar
6	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	PPI Muara Kintap

No.	Provinsi	Kabupaten	Nama Pelabuhan
7	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	PPI Selili
8	Kalimantan Timur	Kab Berau	PPI Sambaliung
9	Kalimantan Timur	Kota Bontang	PPI Tanjung Limau
10	Lampung	Kab. Lampung Selatan	PPI Muara Piluk Bakauheni
11	Lampung	Kab. Lampung Selatan	PPI Kalianda
12	Lampung	Kab. Lampung Selatan	PPI Ketapang
13	Lampung	Kab. Lampung Selatan	PPI Kuala Penet
14	Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	PPI Palipi
15	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	PPI Birea
16	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	PPP Dobo
17	Aceh	Kab. Aceh Barat	PPI Ujong Baroeh
18	Aceh	Kab. Bireun	PPI Peudada
19	Aceh	Kab. Lhoksuemawe	PPI Pusong
20	Sumatera Utara	Kab. Asahan	PPI Tanjung Balai Asahan
21	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	PPI Tarempa
22	Lampung	Kab. Lampung Selatan	PPI Rangai
23	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	PPI Teluk Santong
24	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	PPI Gentuma
25	Gorontalo	Kota Gorontalo	PPI Tenda
26	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	PPI Bonehalang
27	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	PPI Donggala
28	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	PPI Paranggi
29	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	PPI Pagimana
30	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	PPI Sodohoa
31	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	PPI Ujong Serangga
32	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	PPI Pulo Tello
33	Sumatera Barat	Kab. Carocok Tarusan	PPI Carocok Tarusan
34	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	PPI Sungai Selan
35	Jawa Timur	Kab. Gresik	PPI Bawean
36	Jawa Timur	Kab. Sumenep	PPI Pasongsongan
37	Maluku	Kab. Maluku	PPI Banda
38	Aceh	Aceh Timur	PPN Idi
39	Sumatera Utara	Kota Sibolga	PPN Sibolga
40	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	PPN Sungailiat
41	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	PPN Tanjungpandan
42	Banten	Kota Serang	PPN Karangantu
43	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	PPN Palabuhanratu
44	Jawa Barat	Kab. Cirebon	PPN Kejawanan
45	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	PPN Pekalongan

No.	Provinsi	Kabupaten	Nama Pelabuhan
46	Jawa Timur	Kab. Lamongan	PPN Brondong
47	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	PPN Prigi
48	Bali	Kab. Jembrana	PPN Pengambangan
49	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	PPN Pemangkat
50	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	PPN Kwandang
51	Maluku	Kota Ambon	PPN Ambon
52	Maluku Utara	Kota Ternate	PPN Ternate
53	Maluku	Kota Tual	PPN Tual
54	DKI Jakarta	Jakarta Utara	PPN Muara Angke
55	Papua	Kab. Merauke	PPN Merauke
56	Lampung	Kab. Lampung Timur	PPP Labuhan Maringgai
57	Lampung	Kab. Tulang Bawang	PPP Teladas
58	Lampung	Kab. Bandar Lampung	PPP Lempasing
59	Lampung	Kab. Tanggamus	PPP Kota Agung
60	Banten	Kab. Pandeglang	PPP Labuan
61	Jawa Barat	Kab. Garut	PPP Cilautereun
62	Jawa Barat	Kab. Cirebon	PPP Bondet
63	Jawa Barat	Kab. Indramayu	PPP Eretan Wetan
64	Jawa Barat	Kab. Subang	PPP Blanakan
65	Jawa Barat	Kab. Subang	PPP Muara Ciasem
66	Jawa Barat	Kota Kerawang	PPP Ciparage
67	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	PPP Wonokerto
68	Jawa Tengah	Kab. Batang	PPP Klidanglor
69	Jawa Tengah	Kab. Demak	PPP Moro Demak
70	Jawa Tengah	Kab. Kendal	PPP Tawang
71	Jawa Tengah	Kab. Pati	PPP Bajomulyo
72	Jawa Tengah	Kab. Rembang	PPP Tasikagung
73	Jawa Tengah	Kab. Pemasang	PPP Asem Doyong
74	Jawa Tengah	Kota Tegal	PPP Tegalsari
75	D.I Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	PPP Sadeng
76	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	PPP Muncar
77	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	PPP Mayangan
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	PPP Lekok
79	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	PPP Paiton
80	Jawa Timur	Kab. Jember	PPP Puger
81	Jawa Timur	Kab. Malang	PPP Pondok Dadap
82	Jawa Timur	Kab. Pacitan	PPP Tamperan
83	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	PPP Teluk Batang
84	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	PPP Sungai Rengas
85	Sulawesi Utara	Kota Manado	PPP Tumumpa
86	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	PPP Bacan
87	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	PPP Tobelo

No.	Provinsi	Kabupaten	Nama Pelabuhan
88	Aceh	Kab. Aceh Selatan	PPP Labuhanhaji
89	Bengkulu	Kota Bengkulu	PPP Pulau Baai
90	Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli	PPP Ogotua
91	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	PPP Muara Sungai Baturusa
92	Jawa Timur	Kab. Tuban	PPP Bulu
93	Aceh	Kota Banda Aceh	PPS Lampulo
94	Sumatera Utara	Kota Medan	PPS Belawan
95	Sumatera Barat	Kota Padang	PPS Bungus
96	DKI Jakarta	Jakarta Utara	PPS Nizam Zachman
97	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	PPS Cilacap
98	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	PPS Kendari
99	Sulawesi Utara	Kota Bitung	PPS Bitung
100	Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin	PPI Sungsang
101	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	PPI Kumai
102	Kalimantan Tengah	Kabupaten Seruyan	PPI Kuala Pembuang
103	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Bumbu	PPP Batulicin
104	Kalimantan Selatan	Kabupaten Kotabaru	PPI Kotabaru
105	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	PPI Banjarmasin
106	Papua Barat	Kota Sorong	PPP Sorong
107	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman Barat	PPI Sasak
108	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman Barat	PPI Air Bangis
109	Sumatera Barat	Kapupaten Kepulauan Mentawai	PPI Sikakap
110	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	PPI Tiku
111	Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	PPI Kambang
112	Bali	Buleleng	PPI Sangsit
113	Gorontalo	kabupaten Boalemo	PPI Tilamuta
114	Riau	Kota Dumai	PPI Dumai
115	Maluku	Kota Tual	PP Tual
116	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	PP Benjina
117	Jawa Tengah	Tegal	PPI Larangan

D. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan

Tingkat pelayanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan perintis (31 pelabuhan perikanan)

1. Tingkat kualitas waktu penerbitan Izin prinsip (IP) (LPIP) penggunaan tanah dan bangunan (bobot 40 %)
2. Tingkat kepatuhan pengguna jasa (TKPJ) (bobot 30 %)

Tabel 12. Capain Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan

SS 2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing									
IKU 6 Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra
-	-	-			40	44,75	118,88	-	-

E. Persentase Pelabuhan Perikanan dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik melalui keaktifan dalam yang melakukan input data produksi kedalam aplikasi data PIPP. Cara menghitungnya adalah jumlah perikanan non calon Pelabuhan perikanan dalam RIPP (394) dibagi dengan Pelabuhan perikanan yang melakukan input data di aplikasi PIPP dengan nilai kinerja baik

Tabel 13. Pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik

NO	PELABUHAN PERIKANAN	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	TW IV	KATEGORI TW IV
1	PPP. Klidang Lor	98,75	98,75	97,5	98,33	SANGAT BAIK
2	PPP. Mayangan	96,75	97,75	96,5	97,00	SANGAT BAIK
3	PPN. Ternate	95,25	93	95	94,42	SANGAT BAIK
4	PPN. Pengambengan	94	92,5	91	92,50	SANGAT BAIK
5	PPN. Brondong	92	91,75	93	92,25	SANGAT BAIK
6	PPN. Pekalongan	92	91	93	92,00	SANGAT BAIK
7	PPP. Bajomulyo	93,5	92,5	89,25	91,75	SANGAT BAIK
8	PPS. Cilacap	91,25	90	89	90,08	SANGAT BAIK
9	PPN. Kejawan	90,5	87,25	92,25	90,00	SANGAT BAIK
10	PP. Larangan	89,5	89	91,5	90,00	SANGAT BAIK
11	PPN. Sungailiat	88,5	91	89,75	89,75	SANGAT BAIK
12	PPN. Palabuhanratu	91,25	90,25	87,5	89,67	SANGAT BAIK
13	PPP. Muncar	90	88,5	90	89,50	SANGAT BAIK
14	PPN. Pemangkat	89,5	88	90,5	89,33	SANGAT BAIK

NO	PELABUHAN PERIKANAN	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	TW IV	KATEGORI TW IV
15	PPS. Nizam Zachman Jakarta	88,75	91,75	87	89,17	SANGAT BAIK
16	PP. Tambakrejo	88	89,5	89,5	89,00	SANGAT BAIK
17	PPP. Pondok Dadap	89,75	89,75	87,25	88,92	SANGAT BAIK
18	PPP. Batulicin	84,5	90,5	90,5	88,50	SANGAT BAIK
19	PP. Untia	89	89,25	86	88,08	SANGAT BAIK
20	PPI. Tanjung Limau	87,75	87,25	87,5	87,50	SANGAT BAIK
21	PPP. Bacan	86,25	88	88	87,42	SANGAT BAIK
22	PPN. Prigi	74,75	93	94	87,25	SANGAT BAIK
23	PPN. Ambon	86,25	86,25	89,25	87,25	SANGAT BAIK
24	PPS. Bitung	81,75	90,5	88,75	87,00	SANGAT BAIK
25	PP. Popoh	79,75	89	91	86,58	SANGAT BAIK
26	PPP. Tasik Agung	76,5	91,75	91,25	86,50	SANGAT BAIK
27	PP. Teluk Batang	85	87,25	85,75	86,00	SANGAT BAIK
28	PPN. Kwandang	85,25	85,25	86,75	85,75	BAIK
29	PPN. Karangantu	84,5	85,5	85,5	85,17	BAIK
30	PPS. Kendari	84,5	90,5	79	84,67	BAIK
31	PPN. Sibolga	81,5	87,5	82,75	83,92	BAIK
32	PPP. Tegalsari	74,75	90	84	82,92	BAIK
33	PPS. Bungus	84,75	83,5	79,75	82,67	BAIK
34	PP. Selat Lampa	83	81,75	82	82,25	BAIK
35	PPP. Wonokerto	86	86,25	74	82,08	BAIK
36	PPP. Tamperan	79	82,25	83,25	81,50	BAIK
37	PP. Teluk Awang	85,5	78,5	78	80,67	BAIK

NO	PELABUHAN PERIKANAN	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	TW IV	KATEGORI TW IV
38	PPS. Belawan	76,75	80,75	80,75	79,42	BAIK
39	PPN. Tanjungpandan	76,5	71,5	87,5	78,50	BAIK
40	PP. Manggar Baru	76,5	83	75,75	78,42	BAIK
41	PP. Pancer	78,5	78,25	78,25	78,33	BAIK
42	PP. Sangatta	73,75	78,75	77,5	76,67	BAIK
43	PP. Grajagan	78,75	78,75	68,5	75,33	BAIK
44	PPP. Sungai Rengas	74,5	75,5	74,5	74,83	BAIK
45	PP. Sebatik	58	82,75	83,5	74,75	BAIK
46	PPP. Tawang	74,25	79,25	70,5	74,67	BAIK
47	PPP. Karimun Jawa	71,75	74,5	72,25	72,83	BAIK
48	PPP. Morodemak	73	68	76,25	72,42	BAIK
49	PP. Logending	70,75	72,5	72,5	71,92	BAIK
50	PPP. Sorong	65,25	76,75	72,75	71,58	BAIK
51	CP. Api-Api	70,75	70,5	72,5	71,25	BAIK
52	PP. Cikidang	68	72,25	70,75	70,33	BAIK
53	PPP. Bulu	66	71,5	73	70,17	BAIK
54	PP. Tenau Kupang	69	69	70,25	69,42	BAIK
55	PPI. Banjarmasin	65,5	70,5	69,5	68,50	BAIK
56	PPN. Tual	62,75	71	68,5	67,42	BAIK
57	PPN. Muara Angke	67,25	67,25	67,25	67,25	BAIK
58	PPP. Dobo	65	70	65	66,67	BAIK
59	PPI. Pusong	66,25	66	67,25	66,50	BAIK
60	PP. Kuala Tungkal	60	67,25	70,75	66,00	BAIK

Dari tabel diatas, terdapat 60 pelabuhan yang melakukan input data ke dalam aplikasi PIPP dengan kategori berkinerja baik. Jika dibagi dengan jumlah perikanan non calon Pelabuhan perikanan dalam RIPPN (394), maka didapat hasil 15% Pelabuhan dengan Tingkat kinerja baik.

Tabel 14. Capain Persentase pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja baik (persen)

SS 2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing									
IKU 7 Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja baik									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	15	15	100	-	-

F. Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan perikanan yang melakukan input data produksi kedalam aplikasi data PIPP. Cara menghitungnya adalah Pelabuhan perikanan non calon Pelabuhan perikanan dalam RIPPN (394) dibagi dengan Pelabuhan perikanan yang melakukan input data di aplikasi PIPP.

Tabel 15. Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP (Persen)

SS 2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing									
IKU 8 Persentase Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	40	37,06	92,65	-	-

Pada tahun 2023, ada 146 pelabuhan Pelabuhan Perikanan yang melakukan input data di aplikasi PIPP, sebagaimana tabel berikut. Jika di bagi dengan jumlah pelabuhan perikanan non calon pelabuhan perikanan dalam RIPPN sebanyak 394 pelabuhan, maka persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP pada tahun 2023 adalah 37,06%.

Tabel 16. Pelabuhan perikanan yang melakukan input data di aplikasi PIPP

NO.	PELABUHAN YANG MELAKUKAN INPUT DATA DI APLIKASI PIPP
1	CP. Api-api
2	CP. Dompok
3	CP. Kronjo
4	PP. Amurang
5	PP. Banyusangkah
6	PP. Baran
7	PP. Bareleng
8	PP. Beba

NO.	PELABUHAN YANG MELAKUKAN INPUT DATA DI APLIKASI PIPP
9	PP. Belang
10	PP. Binuangeun
11	PP. Camplong
12	PP. Cempae
13	PP. Cikidang
14	PP. Dodepo
15	PP. Dufa-Dufa
16	PP. Dulanpokpok
17	PP. Fandoi
18	PP. Gantung
19	PP. Goto
20	PP. Grajagan
21	PP. Inengo
22	PP. Jakabaring
23	PP. Karanganyar
24	PP. Karangsong
25	PP. Kasiwa
26	PP. Kema
27	PP. Keude Meukek
28	PP. Kijang Bintan
29	PP. Klademak
30	PP. Kluwut
31	PP. Kuala Peukan Baro
32	PP. Kuala Tungkal
33	PP. Lappa
34	PP. Logending
35	PP. Lonrae
36	PP. Manggar Baru
37	PP. Marisa
38	PP. Masami
39	PP. Moro
40	PP. Oeba
41	PP. Pancer
42	PP. Popoh
43	PP. Poumako
44	PP. Sadai
45	PP. Sangatta
46	PP. Sanggeng
47	PP. Sape
48	PP. Sawang Ba'u
49	PP. Sebatik
50	PP. Selat Lampa
51	PP. Selat Nasik
52	PP. Sungai Kakap

NO.	PELABUHAN YANG MELAKUKAN INPUT DATA DI APLIKASI PIPP
53	PP. Tambakrejo
54	PP. Teluk Awang
55	PP. Teluk Sinabang (Lugu)
56	PP. Tenau
57	PP. Tengkeyu II
58	PP. Tual
59	PP. Untia
60	PP. Wameo
61	PPI. Banda
62	PPI. Banjarmasin
63	PPI. Carocok Tarusan
64	PPI. Donggala
65	PPI. Gentuma
66	PPI. Kotabaru
67	PPI. Kuala Pembuang
68	PPI. Kumai
69	PPI. Larangan
70	PPI. Manggar
71	PPI. Muara Kintap
72	PPI. Muara Piluk Bakauheni
73	PPI. Pagimana
74	PPI. Paranggi
75	PPI. Pasongsongan
76	PPI. Pusong
77	PPI. Sambaliung
78	PPI. Selili
79	PPI. Sodohoa
80	PPI. Sungai Selan
81	PPI. Tanjung Balai Asahan
82	PPI. Tanjung Limau
83	PPI. Tenda
84	PPI. Tilamuta
85	PPN. Ambon
86	PPN. Brondong
87	PPN. Idi
88	PPN. Karangantu
89	PPN. Kejawan
90	PPN. Kwandang
91	PPN. Merauke
92	PPN. Muara Angke
93	PPN. Palabuhanratu
94	PPN. Pekalongan
95	PPN. Pemangkat
96	PPN. Pengambengan

NO.	PELABUHAN YANG MELAKUKAN INPUT DATA DI APLIKASI PIPP
97	PPN. Prigi
98	PPN. Sibolga
99	PPN. Sungailiat
100	PPN. Tanjungpandan
101	PPN. Ternate
102	PPN. Tual
103	PPP. Asemdayong
104	PPP. Bacan
105	PPP. Bajomulyo
106	PPP. Batulicin
107	PPP. Bulu
108	PPP. Dobo
109	PPP. Eretan
110	PPP. Karimunjawa
111	PPP. Klidang Lor
112	PPP. Kota Agung
113	PPP. Labuhan Lombok
114	PPP. Labuhan Maringgai
115	PPP. Labuhanhaji
116	PPP. Lekok
117	PPP. Lempasing
118	PPP. Mayangan
119	PPP. Morodemak
120	PPP. Muara Sungai Baturusa
121	PPP. Muncar
122	PPP. Ogotua
123	PPP. Paiton
124	PPP. Pondok Dadap
125	PPP. Puger
126	PPP. Pulau Baai
127	PPP. Sadeng
128	PPP. Sorong
129	PPP. Sungai Rengas
130	PPP. Tamperan
131	PPP. Tasik Agung
132	PPP. Tawang
133	PPP. Tegalsari
134	PPP. Teluk Batang
135	PPP. Tobelo
136	PPP. Tumumpa
137	PPP. Wonokerto
138	PPS. Belawan
139	PPS. Bitung
140	PPS. Bungus

NO.	PELABUHAN YANG MELAKUKAN INPUT DATA DI APLIKASI PIPP
141	PPS. Cilacap
142	PPS. Kendari
143	PPS. Lampulo
144	PPS. Nizam Zachman
145	PU. Benoa
146	PU. Labuan Uki

G. Tingkat Kinerja Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Nilai/Skala)

Tingkat kinerja Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang dihitung berdasarkan:

1. Peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, bobot 30% (x1)
2. Peningkatan jumlah Pelabuhan yang menerapkan kesyahbandaran, bobot 20% (x2)
3. Jumlah STBLKK yang diterbitkan berdasarkan aplikasi TemanSPB, bobot 25% (x3)
4. Jumlah PB yang diterbitkan berdasarkan aplikasi TemanSPB, bobot 25%, bobot 25% (x4)

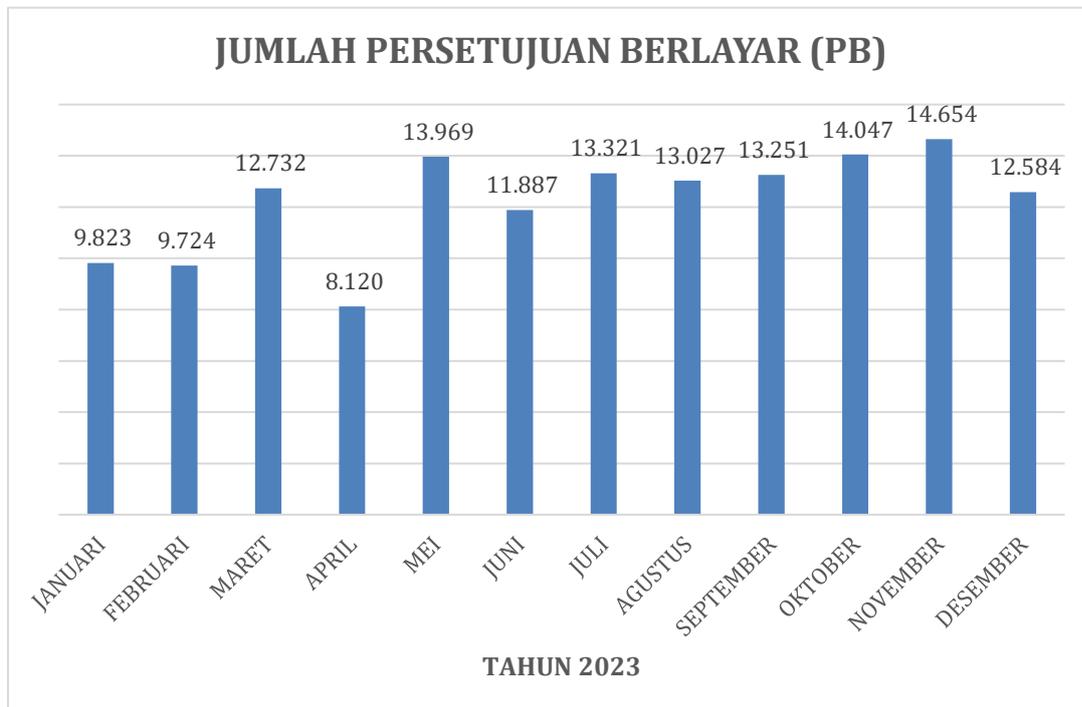
Tabel 17. Capain Tingkat Kinerja Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

SS 2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing									
IKU 9	Tingkat Kinerja Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-			77	77,32	100,42			

a. Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) tahun 2023

- 1) Pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan Sebagai amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. No. 2 Tahun 2022 jo. No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 42, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan.
- 2) Salah satu tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah menerbitkan Persetujuan Berlayar.
- 3) Selama tahun 2023 syahbandar di pelabuhan perikanan telah menerapkan penerbitan PB melalui Aplikasi TemanSPB di 157 lokasi pelabuhan perikanan dengan jumlah PB tahun 2023 adalah sebanyak 147.139 (seratus empat puluh tujuh ribu serratus tiga puluh

sembilan) persetujuan berlayar (PB), dengan grafik sebagai berikut :



- b. Pada tanggal 23-27 Juli 2023 telah dilaksanakan Rapat Teknis Kesyahbandaran di pelabuhan Perikanan Tahun 2023:
- 1) Rapat teknis diikuti oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan baik yang ditempatkan di pelabuhan perikanan UPT Pusat maupun UPT Daerah dan Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
 - 2) Tujuan kegiatan ini adalah untuk : (1) meningkatkan koordinasi pengetahuan Syahbandar terkait dengan pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi dalam rangka tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; (2) menyamakan persepsi para Syahbandar di Pelabuhan Perikanan terkait dengan pelaksanaan penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi; (3) memperkuat sinergi dengan instansi terkait/*stakeholder* dalam pelaksanaan tugas-tugas kesyahbandaran guna mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi; (4) mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan terbitnya regulasi terbaru UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 27 Tahun 2021, dimana Permen KP No. 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan sudah banyak yang tidak relevan seiring dengan terbitnya ketentuan terbaru dimaksud sehingga perlu disinergikan untuk diusulkan revisi Permen KP No. 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; dan (5) Menumbuhkan jiwa korsa/kebersamaan

antar sesama Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

c. Pemenuhan SDM Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

- 1) Keberadaan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sangat dibutuhkan untuk menjamin segi keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan yang meliputi: laik laut, laik tangkap, laik simpan dan lain pengawakan. Keselamatan yang dimaksud adalah selain mengenai kelaiklautan, tata tertib bandar, kepelautan, kenavigasian, dan perairan pelabuhan juga memperhatikan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam hayati.
- 2) Tugas lain Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang tidak kalah pentingnya adalah mengawal pelaksanaan penangkapan ikan terukur dan penarikan PNBP pascaproduksi. Setiap kapal perikanan yang telah melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dan akan memasuki pelabuhan pangkalan harus sepengetahuan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, termasuk memeriksa dokumen kapal perikanan dan ikan hasil tangkapan.
- 3) Jumlah sumberdaya manusia (SDM) Syahbandar di pelabuhan perikanan sampai saat ini sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang yang berasal dari pegawai pusat dan pegawai pemerintah daerah dan ini sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang ada.
- 4) Dalam rangka pemenuhan SDM syahbandar di Pelabuhan perikanan, pada tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu :
 - a) Pengangkatan/pengukuhan syahbandar Pelabuhan perikanan oleh Menteri Perhubungan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di ballroom GMB II Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 27 calon syahbandar di Pelabuhan perikanan. Dimana dengan telah dikukuhkan menjadi syahbandar yang bersangkutan dapat segera melaksanakan pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
 - b) *Upgrading* Sertifikat Kompetensi Keahlian ANKAPIN/ATKAPIN II menjadi ANKAPIN/ATKAPIN I di BPPP Tegal mulai tanggal 29 Agustus s.d 29 September 2023 baik secara online dan offline dengan peserta sebanyak 25 orang berasal dari pegawai UPT pusat. Diharapkan dengan SDM dimaksud telah memiliki kompetensi sertifikat keahlian ANKAPIN/ATKAPIN I kedepan dapat diusulkan untuk mengikuti Diklat Syahbandar di 33 pelabuhan perikanan, sehingga SDM syahbandar di 33 pelabuhan perikanan dapat terpenuhi.
 - c) Telah dilaksanakan Pelatihan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan sebanyak 2 angkatan pada tahun 2023, yaitu :

- Pelatihan petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan Angkatan I dilaksanakan mulai tanggal 13-18 Maret 2023 bertempat di BBPI Semarang dengan jumlah peserta sebanyak 46 (empat puluh enam) orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Pelatihan, Penyuluhan Kelautan dan Perikanan-BRSDMKP.
- Pelatihan petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan Angkatan II dilaksanakan mulai tanggal 11-16 Juli 2023 bertempat bertempat di Pusat Pelatihan Kepelabuhanan Pelindo, Ciawi Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Dimana pelaksanaan kegiatan pelatihan dimaksud Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan bekerja sama dengan Pusat Pelatihan, Penyuluhan Kelautan dan Perikanan-BRSDMKP dan *Enabling Transboundary Cooperation For Sustainable Management Of The Indonesian Seas (ISLME Project) GEF- 5*, dalam melaksanakan Pelatihan Petugas Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

Dengan adanya penambahan petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dapat membantu tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Tingkat Pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PMSA) (Persen)

Kinerja penerapan pelayanan kapal perikanan berbendera asing yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA) yang dihitung berdasarkan:

1. Peningkatan kapasitas SDM petugas PSMA, bobot 30% (X2)
2. Survei Kepuasan yang dinilai oleh pengguna jasa pelayanan kapal perikanan asing yang mendapatkan surat notifikasi penerimaan/penolakan kapal masuk Pelabuhan, bobot 70% (X1)

Tabel 18. Capaian Tingkat pelayan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme PSMA

SS 2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing									
IKU 10 Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme PSMA									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra
-	-	-			76	74	97,37		

Perkembangan penerapan *Port State Measures Agreement* (PSMA) saat ini sebagaimana berikut ini:

- a. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 Pengesahan *Agreement on*

Port State Measures To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur) telah terbit:

- 1) Peraturan Menteri KP Nomor: 39/PERMEN-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur;
 - 2) Keputusan Menteri KP Nomor: 52/KEPMEN-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.
 - 3) Keputusan Dirjen PT selaku Otoritas PSM No. 17 Tahun 2023 tentang Susunan dan Keanggotaan Unit Pelaksana Port State Measures.
- b. Pada tanggal 8 – 12 Mei 2023 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan 4th *Meeting of the Parties (MOP) to the Port State Measures Agreement (PSMA)* di Bali :
- 1) MOP4 dihadiri oleh 295 (dua ratus sembilan puluh lima) partisipan yang berasal dari 54 (lima puluh empat) negara pihak PSMA dan pengamat dari 29 Anggota FAO non pihak, 11 organisasi pemerintah internasional serta 6 organisasi non pemerintah internasional. Pada pertemuan ini juga dihadiri oleh delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Setjen KKP (Biro Hukum, Biro HKLN), BKIPM, KSOP Benoa, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Roma.
 - 2) Salah satu hasil dari pertemuan MOP 4 tersebut adalah para negara anggota menyetujui bahwa “*Strategy to Improve the Effectiveness of the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*” sebagai **Bali Strategy**. *Bali Strategy* adalah strategi untuk memperkuat implementasi pada tingkat nasional, regional, dan global.
 - 3) KKP dalam tindak lanjut dari Bali Strategi tersebut adalah dengan membenahi pelaksanaan PSMA di Indonesia, seperti: (1) peningkatan SDM Petugas Pemeriksa kapal asing dan perlengkapan sarana pendukungnya, (2) Melaporkan hasil pemeriksaan kapal asing kepada FAO dan negara bendera kapal melalui aplikasi GIES.
- c. Pada tanggal 16 – 20 Oktober 2023 telah dilakukan Pelatihan Petugas Pemeriksa Kapal Asing sebanyak 20 orang yang bekerjasama dengan Puslatluh KP, USAID Ber-Ikan dan *National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)*. Peserta pelatihan ini adalah perwakilan dari

Dit. Kelabuhanan Perikanan, Dit. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) – Ditjen. PSDKP, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta, PPS Bungus, PPS Bitung, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Lampulo, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar, BKIPM Jakarta II, BKIPM Manado dan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang. Selanjutnya peserta pelatihan akan bertugas sebagai Petugas Pemeriksa Kapal Asing yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

- d. Pada tanggal 3 - 4 Desember 2023 telah dilaksanakan rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan PSMA :
- 1) Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan (Dit. Lalu Lintas Angkutan Laut), Kementerian Keuangan (Dit. Teknologi dan Informasi, Dit. Efisiensi Proses Bisnis, Dit. Kepabeanaan), Kementerian Tenaga Kerja (Dit. Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan), Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), Kepala Kerja (Dit. Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan), Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Biro Hukum, Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Pusat Karantina Ikan, Setdijen PT. Rapat juga dihadiri secara daring oleh Perwakilan Dit. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Kantor Bea Cukai Benoa dan Petugas PSM Benoa.
 - 2) Tujuan rapat adalah: (1) Mencari solusi terhadap kapal penangkap ikan berbendera Jepang untuk melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan dan akan diangkut kembali ke negaranya; (2) Menginventarisir Pelabuhan Perikanan maupun Pelabuhan Umum yang berpotensi dimasuki kapal asing dan selama ini dimasuki oleh kapal asing; dan (3) Rencana aplikasi PSM bisa bergabung dengan aplikasi *Indonesian National Single Window* (INSW) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan;
 - 3) Beberapa tindak lanjut hasil koordinasi dan Evaluasi penerapan PSM adalah sebagai berikut:
 - Dit. KP akan mengidentifikasi 44 pelabuhan yang ada kegiatan ekspor dan impor untuk ditetapkan menjadi Pelabuhan PSM dan akan berkoordinasi dengan Direktorat Kelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut terkait dengan penetapan Pelabuhan Umum menjadi Pelabuhan Tempat Penerapan PSM.
 - Integrasi aplikasi PSM dengan INSW akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat. Efisiensi Proses Bisnis, Kemenkeu.

- Akan dilakukan pembahasan dengan pihak Pelindo, KSOP dan Bea Cukai terkait dengan rencana kapal Jepang yang akan membongkar dan angkut kembali ikan hasil tangkapan di Benoa.
 - Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait guna pelaksanaan PSM yang lebih baik.
- e. Indonesia juga berperan aktif dalam fase ujicoba GIES dimana pada fase uji coba tersebut telah melakukan penginputan laporan hasil pemeriksaan kapal asing sebanyak 42 kali dan pada akhir Desember 2023 telah menyampaikan permintaan transfer data *fase Piloting GIES* ke *Operational GIES* serta updating USER GIES kepada Sekretariat PSM di Roma melalui email PSMA GIES Sekretariat.
- f. Adapun progres pelaksanaan PSM sejak Februari – November 2023 Sekretariat Otoritas PSM telah menerbitkan 76 Notifikasi Penerimaan Kapal Masuk dan telah disampaikan kepada Pelabuhan PSM sebagaimana berikut ini:
- 1) Pelabuhan Umum Benoa adalah telah dilakukan pemeriksaan kepada 38 Kapal Penangkap Ikan berbendera Jepang, dengan frekwensi pemeriksaan kapal masuk sebanyak 75 kali. Adapun tujuan kapal – kapal tersebut adalah untuk pergantian crew, pengisian perbekalan dan BBM.
 - 2) PPSNZJ telah dilakukan pemeriksaan kepada 1 Kapal Pengangkut/Reefer Cargo berbendera Panama yang menyampaikan permohonan masuk, dalam verifikasi oleh Sekretariat PSM diketahui bahwa:
 - Dikarenakan kedalam kapal 6,79 m sehingga tidak memungkinkan masuk di PPS NZJ sehingga diarahkan masuk di Pelabuhan Umum Marunda.
 - Kapal ini bertujuan untuk pembongkaran ikan sebanyak 3,2 MT, yang terdiri dari: Skipjack, Yellow Fin Tuna, dan Big Eye Tuna, ikan ini sebagai bahan baku untuk PT. Pahala Bahari Nusantara.
 - 3) Sementara PPS Bitung dan PPS Bungus belum ada permohonan kapal masuk.
- g. Hasil pemeriksaan kapal tersebut telah disampaikan kepada Negara Bendera Kapal baik melalui aplikasi GIES maupun email negara Bendera.
- Disepakati bahwa penginputan dalam LA berdasarkan spesies ikan bukan berdasarkan genus, karena masing-masing spesies mempunyai harga yang berbeda dan bahkan ada yang selisih harganya sangat signifikan seperti jenis tuna.
 - Untuk LA form B, maksimal 5 trip
 - Skema lembar awal agar ada permohonan dari pemilik kapal

I. Tingkat Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)

Terdapat 4 komponen penilaian Tingkat penerapan pelaksanaan SHTI sebagai berikut:

- a) Peningkatan kapasitas SDM Petugas SHTI di Pelabuhan Perikanan, bobot 30% (x1)
- b) Peningkatan jumlah Pelabuhan yang menerapkan skema SHTI, bobot 20% (x2)
- c) Jumlah SHTI yang diterbitkan berdasarkan aplikasi SHTI, bobot 20% (x3)
- d) Jumlah verifikasi SHTI dari Negara Importir, bobot 30% (x4)

Tabel 19. Capaian Tingkat penerapan pelaksanaan SHTI

SS 2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing									
IKU 11	Tingkat penerapan pelaksanaan SHTI									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-			71	90	116,88			

Pelaksanaan kegiatan penerapan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan Penerapan SHTI dan LA di Pelabuhan Perikanan
 - 1) Pada periode Januari sampai dengan Desember 2023 jumlah SHTI Lembar Turunan (SHTI LT) yang diterbitkan sebanyak 20.714 Lembar dan SHTI Lembar Turunan yang disederhanakan (SHTI LTS) sebanyak 3.080 Lembar.
 - 2) Lembar Awal (LA) Form A (untuk kapal > 20 GT) sebanyak 3.080 Lembar dan Lembar Awal (LA) Form B (untuk kapal < 20 GT).
 - 3) Surat Pernyataan Pengolahan (Impor) sebanyak 319 Lembar.
- b. pada tanggal 15 – 17 November 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi penerapan SHTI :
 - 1) Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Dit. Perundingan Bilateral Ditjen Perundingan, Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan; Dit. Pemasaran, Ditjen PSDKP; Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BKIPM; Pusat Pengendalian Mutu, BKIPM; Pusat Karantina Ikan, BKIPM; dan Otoritas Kompeten Lokal.
 - 2) Tujuan rapat koordinasi ini adalah optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan SHTI serta persiapan terkait pelaksanaan protokol perubahan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) serta hal-hal terkait pelaksanaan penerbitan SHTI.
 - 3) Kesimpulan Hasil Rapat
 - Atase perdagangan di luar negeri dapat dilihat dalam situs www.kemendag.go.id, para atase tersebut akan responsif untuk menjawab bila ada pertanyaan terkait dengan perdagangan.

- Ketentuan IJEPA dalam rangka untuk memperoleh tarif 0 % untuk produk skipjack dan bonito yang diekspor ke Jepang.
- Kode HS dimasukkan sesuai dengan yang 10 digit dan untuk IJEPA yang 9 digit dapat ditambahkan di catatan kaki karena hanya buyer to buyer.
- Dalam rangka meminimalisir hambatan ekspor, daftar kode HS yang ada di aplikasi SHTI akan disamakan dengan kode HS yang ada di BKIPM.
- BKIPM akan mensirkulasikan daftar kode HS BTKI 2022 kepada Dit. KP untuk dilakukan update di aplikasi SHTI.
- Dalam rangka penerbitan LA, diharapkan ada sharing API dengan HPK di pengawasan.
- Untuk kapal yang transshipment sepanjang BA transshipment bisa dbuatkan LA nya.

3.2.3 Sasaran Srategis (SS-3): Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal

A. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)

Pelabuhan Pangkalan yang menerapkan PIT adalah Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi kriteria yaitu lokasi pelabuhan pangkalan telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tabel 20. Capaian pelabuhan pangkalan yang menerapkan penangkapan ikan terukur.

SS 3 Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Optimal										
IKU 12 Pelabuhan pangkalan yang menerapkan penangkapan ikan terukur										
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-			296	296	296	100		

Berikut adalah data 296 Pelabuhan Pangkalan yang menerapkan PIT yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP 187 Tahun 2023)

Tabel 21. Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PIT

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
1	PP Kuala Tungkal	Provinsi Jambi	Zona 01	UPTD	Pendukung
2	PP Nipah Panjang	Provinsi Jambi	Zona 01	UPTD	Pendukung
3	PPN Pemangkat	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPT Pusat	Utama
4	PPP Sungai Rengas/ PP Sungai Jawi	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD dan UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
5	PPP Teluk Batang	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPT Pusat	Pendukung
6	PP Kuala Mempawah	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
7	PP Kuala Singkawang	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
8	PP Selakau	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
9	PP Suka Bangun	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
10	PP Sungai Duri	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
11	PP Sungai Kakap	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
12	PPN Sungailiat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPT Pusat	Pendukung
13	PPN Tanjungpandan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPT Pusat	Pendukung
14	PPP Muara Sungai Baturusa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
15	PPI Manggar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
16	PPI Sungai Selan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
17	PP Kurau	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
18	PP Sadai	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
19	PP Selat Nasik	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
20	PPI Tarempa	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
21	PP Baran	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
22	PP Bareleng	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	Swasta	Utama

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
23	PP Dompok	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
24	PP Kijang Bintan	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
25	PP Moro	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
26	PP Pering Ranai	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
27	PP Selat Lampa	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	PP Perintis	Utama
28	PP Tajur Biru	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
29	PPI Sungsang	Provinsi Sumatera Selatan	Zona 01	UPTD	Pendukung
30	PP Jakabaring	Provinsi Sumatera Selatan	Zona 01	UPTD	Pendukung
31	PP Sungai Lumpur	Provinsi Sumatera Selatan	Zona 01	UPTD	Pendukung
32	PPN Kwandang	Provinsi Gorontalo	Zona 02	UPT Pusat	Utama
33	PPI Gentuma	Provinsi Gorontalo	Zona 02	UPTD	Pendukung
34	PPI Sambaliung	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 02	UPTD	Pendukung
35	PP Sebatik	Provinsi Kalimantan Utara	Zona 02	PP Perintis	Pendukung
36	PP Tengkeyu II	Provinsi Kalimantan Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
37	PP Fandoi	Provinsi Papua	Zona 02	UPTD	Utama
38	PP Hamadi Jayapura	Provinsi Papua	Zona 02	UPTD	Pendukung
39	PP Waiya Depapre	Provinsi Papua	Zona 02	UPTD	Pendukung
40	PP Sanggeng	Provinsi Papua Barat	Zona 02	UPTD	Pendukung
41	PP Waharia	Provinsi Papua Tengah	Zona 02	UPTD	Pendukung
42	PPP Ogotua	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 02	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
43	PPP Tumumpa	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
44	PP Amurang	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
45	PP Dagho	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
46	PP Likupang	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
47	PP Salibabu	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
48	PP Ulu	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
49	PU Labuhan Uki	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	Umum	Pendukung
50	PPI Tenda	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
51	PPI Tilamuta	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
52	PP Inengo	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
53	PP Marisa	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
54	PPN Ambon	Provinsi Maluku	Zona 03	UPT Pusat	Utama
55	PPN Tual	Provinsi Maluku	Zona 03	UPT Pusat	Utama
56	PPP Dobo	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Utama
57	PPI Banda	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
58	PP Benjina	Provinsi Maluku	Zona 03	Swasta	Utama
59	PP Eri	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
60	PP Kalar Kalar	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
61	PP Kelfik Taar	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
62	PP Masarete	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
63	PP Masohi	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
64	PP Piru	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
65	PP Tamher Timur	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
66	PP Tual	Provinsi Maluku	Zona 03	Swasta	Utama
67	PP Tulehu	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
68	PP Ukurlaran	Provinsi Maluku	Zona 03	PP Perintis	Pendukung
69	PP Wetar	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
70	PPN Ternate	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPT Pusat	Utama
71	PPP Bacan	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
72	PPP Tobelo	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
73	PP Daeo Majiko	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	PP Perintis	Pendukung
74	PP Dufa-Dufa	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
75	PP Goto	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
76	PP Dulanpokpok	Provinsi Papua Barat	Zona 03	UPTD	Pendukung
77	PPP Sorong	Provinsi Papua Barat Daya	Zona 03	UPTD	Pendukung
78	PP Klademak	Provinsi Papua Barat Daya	Zona 03	UPTD	Pendukung
79	PPN Merauke	Provinsi Papua Selatan	Zona 03	PP Perintis	Utama
80	PP Poumako	Provinsi Papua Tengah	Zona 03	UPTD	Utama
81	PPI Pagimana	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
82	PPI Paranggi	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
83	PP Ampana	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
84	PP Bahari	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
85	PP Bente	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
86	PP Bualemo	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
87	PP Kolonodale	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
88	PP Mato	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
89	PP Moahino	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
90	PP Moilong	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
91	PP Toili	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
92	PPS Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPT Pusat	Utama
93	PPI Sodohoa	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
94	PP Laino	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
95	PP Langara	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
96	PP Lasolo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
97	PP Minaminanga	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
98	PP Molawe	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
99	PP Numana	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
100	PP Pasarwajo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
101	PP Rumbia Tengah	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
102	PP Sampolawa	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
103	PP Soropia	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
104	PP Tondasi	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
105	PP Torobulu	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
106	PP Wameo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
107	PPS Bitung	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPT Pusat	Utama
108	PP Atep Oki	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
109	PP Belang	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
110	PP Dodepo	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
111	PP Kema	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
112	PPS Lampulo	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Utama
113	PPP Labuhanhaji	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
114	PPI Ujong Baroeh	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
115	PPI Ujung Serangga	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
116	PP Anak Laut	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
117	PP Keude Meukek	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
118	PP Kuala Tuha	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
119	PP Lhok Bengkuang	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
120	PP Rigah	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
121	PP Sawang Ba'u	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
122	PP Teluk Sinabang (Lugu)	Provinsi Aceh	Zona 04	PP Perintis	Pendukung
123	PPN Pengambangan	Provinsi Bali	Zona 04	UPT Pusat	Utama
124	PPI Kedonganan	Provinsi Bali	Zona 04	UPTD	Pendukung
125	PU Benoa	Provinsi Bali	Zona 04	Umum	Pendukung
126	PPP Labuan	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
127	PP Binuangeun	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
128	PP Cikeusik	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
129	PP Panimbang	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
130	PP Sidamukti	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
131	PPP Pulau Baai	Provinsi Bengkulu	Zona 04	UPTD	Pendukung
132	PPP Sadeng	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Zona 04	UPTD	Pendukung
133	PP Gesing	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Zona 04	UPTD	Pendukung
134	PPN Palabuhanratu	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPT Pusat	Utama
135	PP Batukaras	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
136	PP Cikidang	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	PP Perintis	Pendukung
137	PPP Cilauteureun	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
138	PP Jayanti	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
139	PP Pamayangsari	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
140	PP Ranca Buaya	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
141	PP Ujung Genteng	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
142	PPS Cilacap	Provinsi Jawa Tengah	Zona 04	UPT Pusat	Utama
143	PP Logending	Provinsi Jawa Tengah	Zona 04	UPTD	Pendukung
144	PPN Prigi	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPT Pusat	Pendukung
145	PPP Muncar	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
146	PPP Pondok Dadap	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
147	PPP Puger	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
148	PPP Tamperan	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
149	PP Grajagan	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
150	PP Pancer	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
151	PP Popoh	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
152	PP Sine	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
153	PP Tambakrejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
154	PP Tawang	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
155	PP Tegalrejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
156	PP Watu Ulo	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
157	PU Tanjung Wangi/PP Masami	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	Umum dan Swasta	Pendukung
158	PPP Kota Agung	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
159	PPP Lempasing	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
160	PPI Kalianda	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
161	PPI Ketapang	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
162	PPI Muara Piluk Bakauheni	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
163	PPI Rangai	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
164	PP Bengkuntan	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
165	PP Durian	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
166	PP Kramat	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
167	PP Kuala Stabas Krui	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
168	PP Kunjir	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
169	PP Way Muli	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
170	PPP Labuhan Lombok	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
171	PPI Tanjung Luar	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
172	PP Sape	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
173	PP Soroadu	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
174	PP Teluk Awang	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	PP Perintis	Utama
175	PP Amagarapati	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
176	PP Oeba	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
177	PP Tenau	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
178	PPS Bungus	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPT Pusat	Utama
179	PPI Air Bangis	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
180	PPI Carocok Tarusan	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
181	PPI Kambang	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
182	PPI Sasak	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
183	PPI Sikakap	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
184	PPI Tiku	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
185	PP Pasir Baru	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
186	PP Surantiah	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
187	PPN Sibolga	Provinsi Sumatera Utara	Zona 04	UPT Pusat	Utama
188	PPI Pulo Tello	Provinsi Sumatera Utara	Zona 04	UPTD	Pendukung
189	PPN Idi	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
190	PPI Peudada	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
191	PPI Pusong	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
192	PP le Meulee	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
193	PP Krueng Mane	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
194	PP Kuala Langsa	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
195	PP Kuala Peukan Baro	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
196	PP Kuala Tari	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
197	PP Lambada	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
198	PP Meureudu	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
199	PP Pante Raja	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
200	PP Seuneubok Baroh	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
201	PP Ujung Blang	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
202	PPI Dumai	Provinsi Riau	Zona 05	UPTD	Pendukung
203	PPS Belawan	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPT Pusat	Utama
204	PPI Tanjung Balai Asahan	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPTD	Pendukung
205	PP Tanjung Tiram	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPTD	Pendukung
206	PPP Labu	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPTD	Pendukung
207	PPI Sangsit	Provinsi Bali	Zona 06	UPTD	Pendukung
208	PPN Karangantu	Provinsi Banten	Zona 06	UPT Pusat	Pendukung
209	PP Cituis	Provinsi Banten	Zona 06	UPTD	Pendukung
210	PP Kronjo	Provinsi Banten	Zona 06	UPTD	Pendukung
211	PP Pulokali	Provinsi Banten	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
212	PPS Nizam Zachman	Provinsi DKI Jakarta	Zona 06	UPT Pusat	Utama
213	PPN Muara Angke	Provinsi DKI Jakarta	Zona 06	UPTD	Pendukung
214	PPN Kejawanan	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPT Pusat	Utama
215	PPP Muara Ciasem	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
216	PPP Blanakan	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
217	PPP Bondet	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
218	PPP Ciparage	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
219	PPP Eretan	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
220	PP Dadap	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
221	PP Gebang Mekar	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
222	PP Karangsong	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
223	PP Pal Jaya	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
224	PPN Pekalongan	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPT Pusat	Pendukung
225	PPP Asemdayong	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
226	PPP Bajomulyo	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Utama
227	PPP Karimunjawa	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
228	PPP Klidang Lor	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
229	PPP Morodemak	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
230	PPP Tasik Agung	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
231	PPP Tawang	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
232	PPP Tegalsari	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Utama
233	PPP Wonokerto	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
234	PPI Larangan	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
235	PP Karanganyar	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
236	PP Kluwut	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
237	PP Pulolampes	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
238	PP Sarang	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
239	PP Tanjung Sari	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
240	PP Ujung Batu	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
241	PPN Brondong	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPT Pusat	Utama
242	PPP Bulu	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
243	PPP Lekok	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
244	PPP Mayangan	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Utama
245	PPP Paiton	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
246	PPI Bawean	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
247	PPI Pasongsongan	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
248	PP Banyusangkan	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
249	PP Besuki	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
250	PP Branta Pesisir	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
251	PP Camplong	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
252	PP Campurejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
253	PP Karang Agung	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
254	PP Ngemplakrejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
255	PP Palang	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
256	PP Panarukan	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
257	PP Pondok Mimbo	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
258	PP Randu Putih	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
259	PP Weru	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
260	PPP Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
261	PPI Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
262	PPI Kotabaru	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
263	PPI Muara Kintap	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
264	PPI Kuala Pembuang	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
265	PPI Kumai	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
266	PP Bahaur	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
267	PP Kuala Jelai	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
268	PPI Selili	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
269	PPI Tanjung Limau	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
270	PP Api-Api	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
271	PP Manggar Baru	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
272	PP Sangatta	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
273	PPP Labuhan Maringgai	Provinsi Lampung	Zona 06	UPTD	Pendukung
274	PPP Teladas	Provinsi Lampung	Zona 06	UPTD	Pendukung
275	PPI Kuala Penet	Provinsi Lampung	Zona 06	UPTD	Pendukung
276	PPI Teluk Santong	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
277	PP Soro Kempo	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
278	PPI Palipi	Provinsi Sulawesi Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
279	PP Kasiwa	Provinsi Sulawesi Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
280	PPI Birea	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
281	PPI Bonehalang	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
282	PP Beba	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
283	PP Bonto Bahari Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
284	PP Bonto Bahari Maros	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
285	PP Cempae	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
286	PP Kajang	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
287	PP Lappa	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
288	PP Lero	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
289	PP Lonrae	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
290	PP Polejiwa	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
291	PP Pontap	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
292	PP Untia	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	PP Perintis	Utama

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
293	PPI Donggala	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
294	PP Mapaga	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
295	PP Mangolo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 06	UPTD	Pendukung
296	PP Pitulua	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 06	UPTD	Pendukung

B. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pasca Produksi

Pelabuhan Pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi adalah Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Lokasi Pelabuhan Pangkalan telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
- PNBP Pasca Produksi pada Pelabuhan Pangkalan telah direalisasikan

Tabel 22. Capaian pelabuhan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi

SS 3 Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Optimal									
IKU 13 Pelabuhan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	81	102	125,93		

Tabel 23. Pelabuhan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi

NO	PROVINSI	PELABUHAN KEDATANGAN	JUMLAH BILLING	JUMLAH PNBP
1	DKI Jakarta	PP. Nizam Zachman Jakarta	4.254	161.701.373.817
2	Jawa Tengah	PP. Tegalsari	2.703	89.900.690.537
3	Bali	PU. Benoa	2.671	48.807.954.861
4	Jawa Tengah	PP. Bajomulyo	2.448	46.166.374.723
5	DKI Jakarta	PP. Muara Angke	1.745	38.079.011.620
6	Sulawesi Utara	PP. Bitung	1.729	29.222.444.004
7	Maluku	PP. Dobo	412	16.384.464.681
8	Sumatra Utara	PP. Sibolga	656	16.257.717.693
9	Jawa Timur	PP. Mayangan	503	14.188.342.334
10	Jawa Tengah	PP. Tasik Agung	2.087	13.984.022.622
11	Jawa Barat	PP. Karangsong	237	10.129.256.617
12	Sumatra Utara	PP. Belawan	348	8.496.752.070

NO	PROVINSI	PELABUHAN KEDATANGAN	JUMLAH BILLING	JUMLAH PNBP
13	Jawa Timur	PU. Tanjung Wangi	94	7.707.127.403
14	Sumatra Utara	PP. Tanjung Balai Asahan	274	7.134.203.870
15	Papua	PP. Poumako	185	6.785.882.580
16	Jawa Tengah	PP. Pekalongan	214	6.563.011.393
17	Jawa Barat	PP. Kejawanan	343	6.413.221.887
18	Jawa Tengah	PP. Kluwut	137	5.388.284.392
19	Kepulauan Riau	PP. Baran	386	4.897.745.340
20	Papua Barat	PP. Sorong	102	4.896.157.083
21	Jawa Timur	PP. Masami	48	4.363.028.262
22	Kalimantan Barat	PP. Pemangkat	297	3.562.445.412
23	Jawa Tengah	PP. Cilacap	355	2.793.052.470
24	Nusa Tenggara Barat	PP. Teluk Awang	61	2.723.167.368
25	Kepulauan Riau	PP. Moro	105	2.450.363.602
26	Kepulauan Riau	PP. Barelang	85	2.255.987.134
27	Papua	PP. Fandoi	119	2.228.419.126
28	Jawa Barat	PP. Palabuhanratu	207	2.221.466.870
29	Kalimantan Barat	PP. Sungai Rengas	215	2.177.092.706
30	Sulawesi Utara	PP. Tumumpa	1.390	2.163.839.875
31	Maluku	PP. Tual	68	1.705.706.332
32	Papua Barat	PP. Sanggeng	51	1.432.458.961
33	Jawa Tengah	PP. Klidang Lor	174	1.405.537.917
34	Kepulauan Riau	PP. Dompok	87	1.192.805.928
35	Papua	PP. Merauke	94	1.166.065.229
36	Sulawesi Tenggara	PP. Kendari	1.066	1.126.302.469
37	Kepulauan Riau	PP. Selat Lampa	61	1.066.093.812
38	Kalimantan Utara	PP. Sebatik	19	1.036.128.296
39	Aceh	PP. Lampulo	111	783.720.909
40	Maluku	PP. Ambon	42	678.291.525
41	Maluku Utara	PP. Bacan	488	658.781.368
42	Jawa Timur	PP. Popoh	25	630.962.300
43	Daerah Istimewa Yogyakarta	PP. Sadeng	61	629.895.800
44	Jawa Timur	PP. Tamperan	104	594.866.146

NO	PROVINSI	PELABUHAN KEDATANGAN	JUMLAH BILLING	JUMLAH PNPB
45	Nusa Tenggara Timur	PP. Tenau Kupang	694	565.489.397
46	Maluku Utara	PP. Dufa-Dufa	326	482.918.944
47	Sulawesi Utara	PP. Labuan Uki	108	469.730.331
48	Sumatra Selatan	PP. Jakabaring	22	452.724.230
49	Kepulauan Riau	PP. Kijang	148	351.557.853
50	Gorontalo	PP. Tilamuta	658	305.572.589
51	Gorontalo	PP. Tenda	513	297.955.975
52	Sulawesi Utara	PP. Kema	65	251.791.476
53	Kepulauan Bangka Belitung	PP. Sungailiat	21	212.341.755
54	Sulawesi Utara	PP. Belang	180	193.958.973
55	Kalimantan Timur	PP. Tanjung Limau Bontang	158	188.735.283
56	Maluku Utara	PP. Tobelo	70	164.218.946
57	Gorontalo	PP. Gentuma	260	157.145.555
58	Kalimantan Timur	PP. Sambaliung	31	143.133.898
59	Nusa Tenggara Barat	PP. Labuhan Lombok	119	138.381.750
60	Maluku Utara	PP. Ternate	169	133.358.940
61	Jawa Timur	PP. Prigi	23	121.469.050
62	Jambi	PP. Kuala Tungkal	3	107.977.430
63	Jawa Barat	PP. Eretan Wetan	9	94.337.291
64	Kalimantan Barat	PP. Selakau	26	88.473.266
65	Jawa Timur	PP. Muncar	2	82.422.000
66	Sulawesi Selatan	PP. Lappa	123	63.665.008
67	Maluku	PPN Tual	4	60.029.720
68	Kepulauan Bangka Belitung	PP. Tanjung Pandan	9	56.808.800
69	Gorontalo	PP. Kwandang	25	55.124.360
70	Sulawesi Tengah	PP. Ogotua	42	50.216.419
71	Sulawesi Utara	PP. Dodepo	90	39.068.500
72	Bali	PP. Pengambangan	1	38.120.868
73	Gorontalo	PP. Inengo	170	33.752.283
74	Jawa Barat	PP. Blanakan	37	31.156.755
75	Maluku Utara	PP. Goto	39	29.066.875
76	Jawa Tengah	PP. Karanganyar	53	28.632.088

NO	PROVINSI	PELABUHAN KEDATANGAN	JUMLAH BILLING	JUMLAH PNBP
77	Bengkulu	PP. Pulau Baai	4	27.736.700
78	Aceh	PP. Idi	26	27.210.965
79	Banten	PP. Binuangen	18	26.923.120
80	Maluku	PP. Benjina	1	24.258.550
81	Lampung	PP. Muara Piluk Bakauheni	4	23.875.500
82	Kalimantan Selatan	PP. Banjarmasin	24	15.988.260
83	Sulawesi Utara	PP. Dagho	43	14.606.873
84	Jawa Timur	PP. Brondong	4	11.469.240
85	Sulawesi Utara	PP. Amurang	15	11.455.125
86	Sulawesi Selatan	PP. Untia	11	10.061.875
87	Gorontalo	PP. Marisa	52	8.640.028
88	Sulawesi Tenggara	PP. Sodohoa	17	8.221.475
89	Banten	PP. Kronjo	8	7.334.955
90	Jawa Tengah	PP. Sarang	4	3.769.600
91	Kalimantan Timur	PP. Manggar Baru	4	3.535.665
92	Jawa Tengah	PP. Jobokuto (Ujung Batu)	7	3.274.300
93	Sulawesi Selatan	PP. Lonrae	6	2.772.000
94	Jawa Timur	PP. Pondok Dadap	2	1.698.200
95	Sulawesi Selatan	PP. Bonto Bahari Maros	3	1.523.000
96	Sulawesi Barat	PP. Kasiwa (Kasiwah)	4	1.235.050
97	Sulawesi Selatan	PP. Cempae	4	1.060.000
98	Sulawesi Selatan	PP. Beba	10	951.125
99	Lampung	PP. Labuhan Maringgai	1	900.050
100	Nusa Tenggara Barat	PP. Tanjung Luar	3	535.010
101	Papua Barat	PP. Klademak	1	445.928
102	Sumatra Barat	PP. Bungus	2	79.350
JUMLAH			31.379	590.829.055.441

C. Tingkat Penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan yang di Tetapkan (Nilai/Skala)

Kriteria yang di penuhi oleh pelabuhan pangkalan dalam pelaksanaan PNBP Pasca Produksi. Kriteria ditetapkan berdasarkan skala 1-3 dengan tingkatan sebagai berikut :

1. Kurang (<50%)
2. Sedang (50-<80 %)
3. Baik (80-100%)

Kriteria :

1. Persentase ketersediaan SDM pendukung penerapan PNBP Pasca (ketersediaan SDM dibanding dengan kebutuhan SDM).
2. Persentase jumlah kapal perikanan izin pusat yang berkontribusi terhadap PNBP Pasca (jumlah kapal yang kontribusi/kapal izin pusat (ijin pasca).
3. Persentase pendataan produksi ikan hasil tangkapan dari pendaratan kapal ikan izin pusat (perbandingan pelabuhan perikanan yang menyapaikan data dengan kepatuhan input di PIPP).

Tabel 24. Capaian tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di pelabuhan perikanan yang ditetapkan

SS 3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Optimal									
IKU 14	Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan perikanan yang ditetapkan									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-			88	89	102,30	-	-	

Formulasi Perhitungan

Teridentifikasinya pelabuhan Perikanan yang memenuhi kriteria sebagai Pelabuhan pangkalan untuk menerapkan PNBP Pasca Produksi dan PIT

Kriteria	Kebutuhan			Ketersediaan			%
	SDM Detasering	SDM Pendataan	Total	SDM Detasering	SDM Pendataan	Total	
Persentase ketersediaan SDM pendukung penerapan PNBP Pasca (ketersediaan SDM dibanding dengan kebutuhan SDM)	146	600	746	146	500	646	87%
		Jumlah Kapal Izin Pusat	Jumlah Kapal Realisasi PNBP				
Persentase jumlah kapal perikanan izin pusat yang berkontribusi terhadap PNBP Pasca (jumlah kapal yang kontribusi/kapal izin pusat (ijin pasca)		9.826	8.372				85%
		pelabuhan perikanan dengan realisasi PNBP	Pelabuhan Perikanan yang Aktif pendataan di PIPP				
Persentase pendataan produksi ikan hasil tangkapan dari pendaratan kapal ikan izin pusat (perbandingan pelabuhan perikanan yang menyapaikan data dengan kepatuhan input di PIPP)		100	94				94%
							89%

D. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf Internasional yang Dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)

Indikator ini menunjukkan tahapan pelaksanaan PHLN sesuai Loan Agreement:

- a. Proses penyiapan Loan Effective
 1. Pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum efektif loan (penyusunan Amdal dan Izin Lingkungan).
 2. Pembukaan rekening khusus.
 3. Proses permohonan pengisian *Initial Deposit* Rekening khusus dan permohonan nol.
- b. Proses pelaksanaan Pembangunan

Persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional.

Alokasi anggaran dari tahun 2023 adalah 0,05 % dari total pinjaman.
- c. Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf Internasional ini meliputi kegiatan:
 1. Pendampingan sekaligus fungsi administrasi untuk kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf internasional yang dikembangkan berupa penyusunan perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan (*review masterplan* dan DED) dan penyiapan pengawasannya
 2. Penyiapan dokumen seleksi dan penyusunan HPS pekerjaan jasa konsultasi (PMC dan CMC) untuk 2 lokasi (PPN Kejawatanan dan PPN Pengambangan)
 3. Pengendalian perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf internasional
 4. Penyiapan dokumen tender dan penyusunan HPS pekerjaan konstruksi untuk 2 lokasi (PPN Kejawatanan dan PPN Pengambangan)
 5. Pengendalian pelaksanaan konstruksi/pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf internasional pada 2 lokasi
 6. Penyiapan pengadaan peralatan pendukung operasional pelabuhan perikanan (*equipment*)
 7. Penyiapan dokumen seleksi, penyusunan HPS dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan kajian pengelolaan pelabuhan Perikanan (PMOC)
 8. Pengelolaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaannya (di Pusat dan UPT) dan pengelolaan administrasi proyek

Perhitungan didasarkan pada persentase realisasi pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional yang dibangun melalui PHLN sesuai dengan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*).

Tabel 25. Capaian persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan fish market bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri.

SS 3 Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Optimal									
IKU 15 Capaian persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan fish market bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	100	100	-	-

E. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang Dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (Loan Agreement). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep *Eco Fishing Port* (pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan) ini meliputi kegiatan:

1. Pendampingan sekaligus fungsi administrasi untuk kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan yang dikembangkan berupa penyusunan perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan (*review masterplan* dan DED) dan penyiapan pengawasannya
2. Penyiapan dokumen seleksi dan penyusunan HPS pekerjaan jasa konsultasi (TAO/PMC dan CMC) untuk 4 lokasi (PPS Belawan, PPS Cilacap, PPS Kendari dan PPS Bitung)

Penghitungan didasarkan pada persentase keuangan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep *Eco Fishing Port* (pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan) yang dibangun melalui PHLN sesuai dengan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*)

Tabel 26. Capaian persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep eco fishing port yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri.

SS 3 Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Optimal									
IKU 16 persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep eco fishing port yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri.									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	100	100	-	-

3.2.4 Sasaran Kegiatan (SK-4): Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan

Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang menunjukkan pencapaian pengelolaan Kepelabuhanan perikanan antara lain Tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (Nelayan dan di Pelabuhan Perikanan) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan, Tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan Kawasan Pelabuhan Perikanan. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan atau tahunan dan target indikator ini adalah 741 pada tahun 2023.

Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan pelabuhan perikanan pada tahun 2023 adalah Syahbandar di pelabuhan perikanan, petugas syahbandar, petugas CPIB dan Petugas PIPP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Tenaga kerja yang terlibat

No	Tenaga Kerja yang Terlibat	Jumlah
1	Syahbandar	178
2	Petugas Syahbandar	295
3	Petugas CPIB	276
4	Petugas PIPP	120
5	Petugas Detasering	95
	Total	964

3.2.5 Sasaran Kegiatan (SK-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dilingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

A. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari rekonsiliasi kinerja adalah untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

- a. Output yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yaitu
 - Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian dan ketepatan masing-masing unit kerja;
 - Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon, dan;
 - Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.
- b. Dokumen yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja:
 - Perjanjian Kinerja (PK)
 - Manual IKU
 - Rincian Target IKU
 - Rencana Aksi (Renaksi)
 - Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I, II, dan III
 - Dokumen data Dukung Lkj Triwulan III
- c. Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP (kinerja) di Dit. Kepelabuhanan Perikanan, yaitu:
 - Perencanaan Kinerja;
 - Pengukuran Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja;
 - Evaluasi Kinerja, dan;
 - Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Pada tahun 2023, nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan ditetapkan senilai 99,21 %, sebagaimana gambar dibawah ini.

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA 2023											
NAMA UNIT KERJA	Ditjen Perikanan Tangkap										
NAMA UNIT YBS	Direktorat Kepelabuhanan										
USER KINERJAJUKU	0304000900										
TANGGAL REKON	15 November 2023										
ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ			
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw III*			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Skor	100,00										
Catatan											
ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI			
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaaku			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Skor	100,00										
Catatan											
ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2023						ASPEK KETEPATAN				
	Tw I		Tw II		Tw III		Penyampaian LKJ Tahunan		Ke Atas		
	118,12		112,41		120,00		pada Aplikasi ESR		100,00		
Skor	116,84						100,00				
Catatan											
SKOR	ASPEK PENILAIAN				SKALA						
		KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN	>90 - 100		SANGAT BAIK			
	Bobot	25%	25%	30%	20%	>85 - 90		BAIK			
	Skor per aspek	100,00	100,00	116,84	100,00	>75 - 85		CUKUP			
	Skor dikali Bobot	25,00	25,00	29,21	20,00	>50 - 75		KURANG			
Total Skor	99,21										
CATATAN:	1. Pada tahun 2023, Direktorat Kepelabuhanan terdapat 9 Indikator Kinerja, terdiri dari 3 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 4 Indikator Triwulanan										
	2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 99,21										

B. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Sedangkan dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus. Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi ke pegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP.

Tantangan dalam pencapaian IKU ini salah satunya yaitu terkait sisi pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih *user friendly*. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai KKP, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai.

Pada tahun 2023, Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mencapai 88.12 (kategori sedang) seperti terlihat pada gambar dibawah ini berdasarkan aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id/>

→ Not secure ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023/unker/250 ☆

Gmail YouTube Maps

IP ASN 2023 Dashboard Eselon Pegawai FAQ

Silakan ketik Nama Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	95	21.23	84.92 %	25.75	64.38 %	24.74	82.47 %	5	100 %	76.72	SEDANG
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	53	21.43	85.72 %	37.88	94.7 %	25.09	83.63 %	5	100 %	89.41	TINGGI
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	53	21.72	86.88 %	25.21	63.02 %	25	83.33 %	5	100 %	76.92	SEDANG
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	56	21.61	86.44 %	36.52	91.3 %	25	83.33 %	5	100 %	88.12	TINGGI
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	59	21.44	85.76 %	38.16	95.4 %	25	83.33 %	5	100 %	89.6	TINGGI

Gambar 4. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan per Desember Tahun 2023

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023)

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam mendukung capaian sebesar 88.12% untuk indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan antara lain:

- Melaksanakan rapat penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 sesuai dengan nomor memorandum B.5970/DJPT.4/TU.330/IX/2023 tanggal 26 September 2023;
- Memorandum nomor 1196/DJPT.1/TU.140/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur lingkup Ditjen Perikanan Tangkap perihal Capaian Indikator Kinerja Utama IP ASN Semester I Tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- Surat nomor B.5633/DJPT.4/PI.310/IX/2023 tanggal 6 September 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Detasering Pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP dalam rangka Mendukung Penerapan Penarikan PNPB Pascaproduksi di Pelabuhan Pangkalan;
- Memorandum nomor 3295/DJPT.4/RSDM.510/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Usulan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Kepelabuhanan Perikanan sesuai dengan surat undangan nomor: B.4906/DJPT.4/TU.330/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;
- Melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung sesuai dengan surat undangan nomor: B.5034/DJPT.4/TU.330/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 perihal;
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Pendataan PNPB Pascaproduksi sesuai dengan surat undangan nomor: B.5085/DJPT.4/TU.330/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

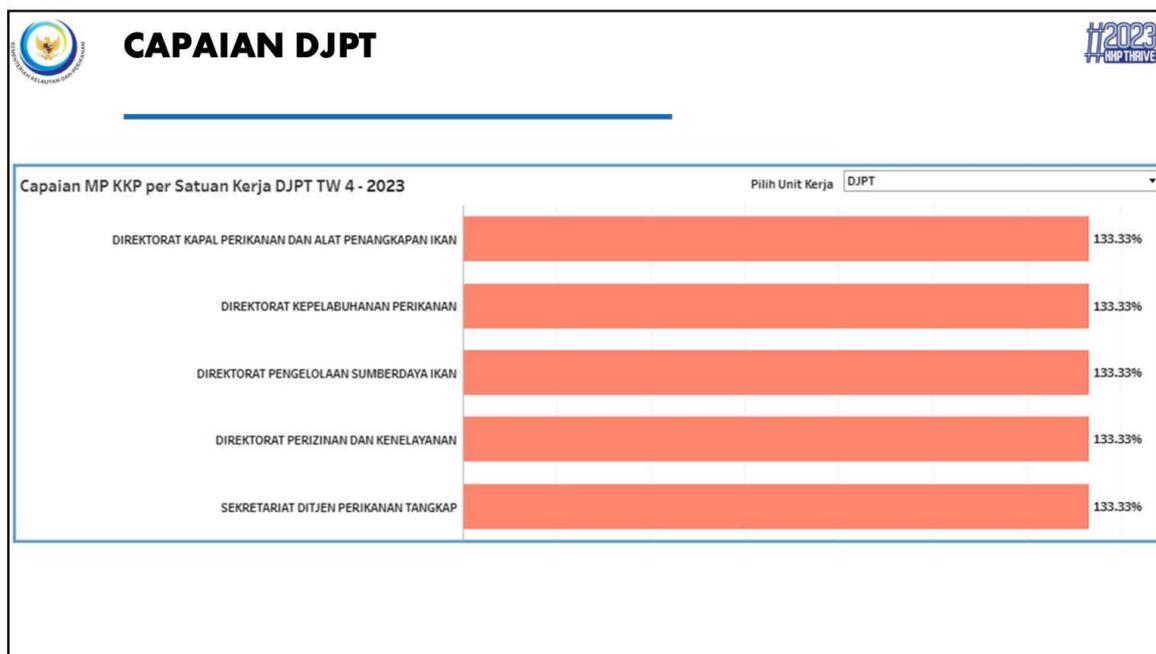
- h. Surat nomor B.5310/DJPT.4/TU.110/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Pendataan Pegawai yang memiliki sertifikat ANKAPIN/ATKAPIN I dan II dalam rangka pemenuhan SDM Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan guna mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PNBP Pasca Produksi;
- i. Melaksanakan Bimbingan Teknis Petugas Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Memorandum nomor: 3486/DJPT.4/TU.330/IX/2023 tanggal 1 September 2023.
- j. Usulan pengembangan kompetensi SDM lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, dengan memorandum nomor 3871/DJPT.4/KP.210/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023
- k. Penyampaian berkas-berkas pegawai Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menurut ketentuan sudah waktunya dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi, dengan memorandum nomor 2455/DJPT.4/KP.440/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023
- l. Usulan peserta pelatihan PPK Tipe C, dengan memorandum nomor 3906/DJPT.4/KP.210/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023.

C. Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 2-4 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih (*aplikasi Bitrix24*).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Pada bulan September tahun 2023 terdapat perubahan terkait Manajemen Pengetahuan tidak lagi menggunakan aplikasi bitrix24 melainkan menggunakan <http://portal.kkp.go.id> terdapat perubahan yaitu: membuat status minimal 8 (delapan) kali *upload* dalam aplikasi dengan tema kelautan dan perikanan.



Tabel 28. Capaian persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

SS 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kelabuhan Perikanan									
IKU 20	Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	92	133,33	144,92	92	144,92	

Pada Tahun 2023, realisasi IKU Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar telah mencapai 144,92 % terhadap target tahun 2023. Hal ini dikarenakan semua pegawai yang seharusnya mengisi (Direktur, Koordinator dan Subkoordinator) telah berpartisipasi aktif dalam penggunaan teknologi ini. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar mencakup tiga komponen yaitu :

1. Kepatuhan dalam menyampaikan dokumen (Renstra, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja, dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi)
2. Keikutsertaan : pimpinan unit kerja level II
3. Keaktifan : pimpinan unit kerja level II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yakni kepatuhan dalam penyampaian dokumen dan keaktifan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan capaian IKU agar mencapai target yang diinginkan yaitu tetap berpartisipasi aktif minimal melakukan 8 (delapan) kali *upload* dalam aplikasi dengan tema kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Direktorat Kelabuhanan Perikanan berdasarkan LHP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2022 s.d. Triwulan IV tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menjadi objek pengawasan. Pada tahun 2023 capaian Indikator Kinerja ini sebesar 100%. Capaian dinyatakan 100% jika tidak ada rekomendasi hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti atau dilengkapi dan disampaikan atau jika rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, pada tahun 2023 belum ada rekomendasi hasil pengawasan pada Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang dokumennya perlu ditindaklanjuti, dilengkapi dan disampaikan.

Tabel 29. Capaian Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan

SS 5 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kelabuhanan Perikanan									
IKU 21 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan									
Realisasi 2018-2022					Realisasi 2023			Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2023	% Capaian Tahun 2023 thd Target Akhir Renstra
-	-	-			92	133,33	144,92	92	144,92

E. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan

Persentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

Target indikator nilai Presentase penyerapan Anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan pada 2023 adalah 40% untuk semester 1 dan 95% untuk semester 2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2023 ini adalah sebesar Rp.80.243.894.496,- atau telah mencapai 84,74%. Adapun realisasi berdasarkan aplikasi <https://sakti.kemenkeu.go.id/> pengelompokan anggaran adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 30. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	
	(Rp)	(Rp)	%
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (2338)	94.686.143.000	80.243.894.496	84,74
PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.600.000.000	1.589.221.339	99,33
BGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	12.154.185.000	10.584.929.026	80,88

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	
	(Rp)	(Rp)	%
CBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	6.049.566.000	6.006.549.255	99,29
QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	4.200.000.000	4.155.189.016	98,93
RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	38.425.100.000	27.191.098.101	71,10
SCC Petugas pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	22.631.300.00	19.455.704.658	85,97
FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.954.092.000	1.927.042.458	98,62
RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	7.854.900.00	7.833.296.616	99,72

(Sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id/>, 2023)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai realisasi anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah 85,74 %. Tidak tercapainya target 95% penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhan Perikanan Tahun 2023 dikarenakan terdapat sisa anggaran yang tidak bisa direalisasikan yaitu dari anggaran PHLN dan PNBPN.

Total alokasi anggaran PHLN utk Proyek Eco Fishing Port thn 2023 sebesar Rp. 14,8 M dg penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana awal (saat penyusunan RKAKL th 2022) diperuntukan utk Pembayaran Uang Muka (UM) Jasa Konsultansi (TAO dan CMC) dg cara Pembayaran Langsung (PL).
2. Asumsinya adalah Kepmen KP tentang Tim Pengelolaan Proyek tersebut bisa selesai awal tahun (Feb 2023) dan efektif loan dari Kementerian Keuangan pada bulan Maret 2023.

Faktanya bhw kedua dokumen tersebut terbit pada bulan Mei 2023 untuk Kepmen KP dan tanggal 28 Juni 2023 untuk efektif loan. Hal ini berdampak pada terlambatnya proses PBJ Secara ICB, tidak bisa terpilih pekerjaan konsultan tsb pd th 2023 (paling cepat April 2024), dilakukan revisi Anggaran semula utk secara PL menjadi Reksus, alokasi dana reksus (initial deposit) yg disiapkan oleh AFD dan Kemenkeu pd tahun 2023 hanya EURO 275.000 (sekitar Rp. 4 M). Untuk pemanfaatan dana reksus tersebut (EURO 275.000) harus memperoleh NOL dari AFD. Hanya beberapa kegiatan yg memperoleh NOL pd th 2023, diantaranya Bimtek Syahbandar, Bimtek Pengelolaan Proyek, Biaya Rapat, kebutuhan operasionan Proyek. Jika ada penambahan pemanfaatan dana reksus tersebut maka tetap harus memperoleh NOL dari AFD, dilakukan audit oleh BPK terlebih dahulu (masih didiskusikan oleh Kemenkeu), penyerapan anggaran dana reksus yg ada minimal 70%, waktunya cukup untuk melaksanakan kegiatan, dan lain-lain.

3. Karena pertimbangan hal2 diatas, maka tidak memungkinkan untuk menyerap sisa anggaran PLN (setelah dipotong alokasi EURO 275.000 tsb=Rp. 4 M) atau sekitar Rp. 10,8 M.

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unit eselon II di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kelautan dan Perikanan berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Rencana strategis KKP, Rencana strategis DJPT, dan perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kelautan dan Perikanan triwulan IV Tahun 2023 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama triwulan III. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya pada triwulan III sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Terdapat data perhitungan baru pada tahun 2023, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kelautan dan Perikanan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun selanjutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU agar dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya. Tindaklanjutnya melaksanakan rapat koordinasi terkait percepatan penyelesaian kegiatan pendukung IKU lingkup Direktorat Kelautan dan Perikanan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk setiap IKU konsisten terhadap jadwal pelaksanaan yang telah dibuat.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Direktorat Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Direktur Kelautan dan Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.